



KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

INSIGHT

Islamic Economy Bulletin

UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia





FOKUS UTAMA

UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia



07 WAWANCARA

Lukmanul Hakim
Staff Wakil Preiden RI

Potensi UMKM dalam membangun perekonomian yang terdampak pandemi



11 WAWANCARA

Putu Rahdhiwiyasa
Direktur Bisnis & Kewirausahaan

Peran KNEKS dalam Mendorong Pengembangan UMKM Halal



32 WAWANCARA

Mohammad Isnaeni
Kadiv Mikro BSI

Peran Perbankan Syariah dalam perkembangan UMKM Halal



34 WAWANCARA

Abdul Rahem
Dosen Fakultas Farmasi UNAIR

Riset & Kajian Mengenai UMKM ditengah Pandemi

AKADEMIA 25

Rahmad Hakim
Kaprod Ekonomi Syariah
Univ Muhammadiyah Malam
Optimalisasi 4-SI Dalam Pengembangan
UMKM dan Industri Halal di Indonesia



AKADEMIA 37

Ana Toni Roby Candra Yudha
Dosen FEBI UIN
Sunan Ampel Surabaya
Integrasi Filantropi Islam dan Industri Halal



INSIGHTFUL

Dukungan Pemerintah...	29
Syarat Sertifikasi Halal Gratis	30
Syarat Khusus Sertifikasi Halal	31
Cek Kehalalan Produk	41
Setelah Memiliki Sertifikasi Halal	42

Sambutan

Direktur Executive KNEKS

Ventje Rahardjo Soedigno



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Buletin Insight ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Jaringan UMKM tersebar di berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas. Potensi dan peluang UMKM industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim potensial. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen Muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti norma subjektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas.

Usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi kunci mengurangi tingkat pengangguran. Sektor ekonomi ini menyerap tenaga kerja sebesar 116.673.416 jiwa atau 97,02 persen dari seluruh sektor usaha di Indonesia. Usaha mikro menyerap 89,17 persen dan usaha kecil 4,74 persen. Sedangkan usaha menengah menyerap 3,11 persen atau 3,7 juta tenaga kerja.

Oleh karenanya, UMKM adalah kunci dalam mengakselerasi ekonomi syariah Indonesia yang harus diperhatikan, dijaga dan dikembangkan secara serius oleh kita bersama. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan UMKM industri halal.

Beriringan dengan ini, upaya yang telah dilakukan KNEKS ialah mewujudkan sinergi para pemangku kepentingan tersebut yang dilaksanakan dalam 28 aspek, yaitu antara lain meliputi pelatihan dan literasi halal untuk pelaku UMKM Industri Halal, kerja sama layanan digital banking syariah, pelatihan tenaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH), fasilitasi transaksi ekspor, serta aktivitas lainnya yang berdampak signifikan pada pengembangan industri halal Indonesia.

Selain itu, KNEKS juga telah membuat 8 Modul Dasar Pembinaan UMKM Industri Halal yang sudah diluncurkan. Seluruh aspek kerjasama tersebut tertuang dalam *memorandum of understanding* yang ditandatangani oleh pimpinan kementerian/ lembaga serta pelaku usaha yang terlibat dalam *pilot project* Sentra UMKM Industri Halal. Program Sinergi Akselerasi UMKM Industri Halal merupakan gerakan nyata yang akan mengorkestrasi inisiatif penguatan UMKM Industri Halal di Indonesia, sehingga implementasi bentuk sinergi berjalan dengan efisien dan efektif.

Diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KNEKS dapat menjadi momentum Gerakan Bersama untuk mendukung pengembangan UMKM dan mendorong kebangkitan ekonomi paska pandemi, serta mampu menjadikan produk halal Indonesia mampu berdaya saing di dunia internasional.

Wabillahitaufik Walhidayah

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Direktur Eksekutif KNEKS

Dewan Redaksi/Pakar

Sutan Emir Hidayat

Taufik Hidayat

Ahmad Juwaini

Afdhal Aliasar

Putu Rahwidhiyasa

Pimpinan Redaktur

Inza Putra

Redaktur Pelaksana

Ishmah Qurratu'ain

Redaktur

Stefany

Lutfia Amelia

Siti Hawarina

Lia Siti Mazzidah

Muhammad Iqbal Ariz Rizki

Desain & Layout

Tim KNEKS

Diterbitkan oleh:

Komite Nasional Ekonomi
Keuangan Syariah (KNEKS)
Gedung Permata Kuningan,
Lantai PH Jalan Kuningan
Mulia No. 9C, Jakarta 12980,
Indonesia

Email. humas@kneks.go.id

website. www.kneks.go.id



UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia



Keberadaan UMKM adalah hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara sehingga tidak jarang UMKM dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Di Indonesia, perhatian terhadap UMKM telah menjadi agenda penting dalam rangka tidak saja untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja dan berfungsi untuk distribusi barang dan jasa.

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memang terlihat meningkat sejak 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM per Maret 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu,

UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia.

Namun, dilain sisi data ini juga menunjukkan, sedikitnya 25,6 persen UMKM hadir pada ekosistem digital atau sekitar 16,4 juta pelaku usaha. Peranan UMKM dalam sektor digital masih belum menunjukkan hasil signifikan, dibandingkan dengan laju pertumbuhan pasar UMKM di Indonesia. Melihat kenyataan ini maka perlu ada perhatian khusus kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas usahanya dengan ditopang teknologi digital sehingga dapat lebih cepat tumbuh dan tentunya dapat menembus pasar global.

Jika produktivitas UMKM dapat

ditingkatkan, maka sektor UMKM akan mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu mengurangi pengangguran. Sehingga kekuatan ekonomi suatu negara memiliki hubungan yang positif dengan kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu negara.

Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia. Namun demikian, UMKM masih mempunyai banyak permasalahan klasik yang belum terselesaikan. Masalah kurangnya akses modal, bahan baku, kemampuan, dan informasi masih menjadi penghambat peningkatan daya saing UMKM.

Peran LKS dalam Pengembangan UMKM

Adapun jika ditilik dari sumber dana, UMKM masih mengandalkan modal sendiri yaitu sebesar 71 persen sedangkan akses dari dunia perbankan hanya sebesar 16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang terserap oleh UMKM masih

minim. Padahal, dari 110 juta jiwa tenaga kerja nasional, sekitar 97,3 persen bekerja pada sektor UMKM. Artinya masih ada permasalahan *finansial inclusion*.

Financial inclusion menurut World Bank, adalah suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga ataupun nonharga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Jadi tujuan dari *financial inclusion* di Indonesia adalah untuk dapat menyelamatkan kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti penyelamatan usaha lokal dan usaha mandiri agar tercapainya koherenitas terhadap perkembangan zaman. Dalam hal ini mestinya pelaku UMKM bisa mendapatkan kemudahan akses permodalan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.

Perkembangan sektor lembaga keuangan syariah baik yang formal seperti perbankan dan nonformal seperti *Baitul mal wal tamwil* (BMT) yang semakin pesat diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM. Kehadiran LKS khususnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor riil dikarenakan produk inti dari LKS atau LKMS yaitu skim *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

Menurut Aisyah (2009) program keberpihakan UMKM oleh perbankan syariah ditunjukkan melalui: (1) inovasi strategi pembiayaan; (2) *Program Linkage* antara bank syariah dengan BMT; (3) *Pilot project*; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) *Kerjasama technical assistance*. Setiap bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan yang berbeda, misalnya bank syariah mendirikan



Jadi tujuan dari financial inclusion di Indonesia adalah untuk dapat menyelamatkan kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti penyelamatan usaha lokal dan usaha mandiri agar tercapainya koherenitas terhadap perkembangan zaman.

pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan juga konsep *linkage*, dimana bank syariah menyalurkan pembiayaan UMKM melalui BPRS dan BMT. Proses *linkage* dapat ditempuh dengan *join financing* atau *chanelling*.

Agar mewujudkan *financial inclusion* tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat terutama pelaku UMKM. Salah satu keuangan mikro berbasis syariah yang sudah dikenal masyarakat adalah *Baitulmaal Wal Tamwil* (BMT). BMT memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya. Operasional BMT dilakukan dengan cara pendampingan kepada para anggotanya sehingga model pendekatan ini memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para anggotanya.

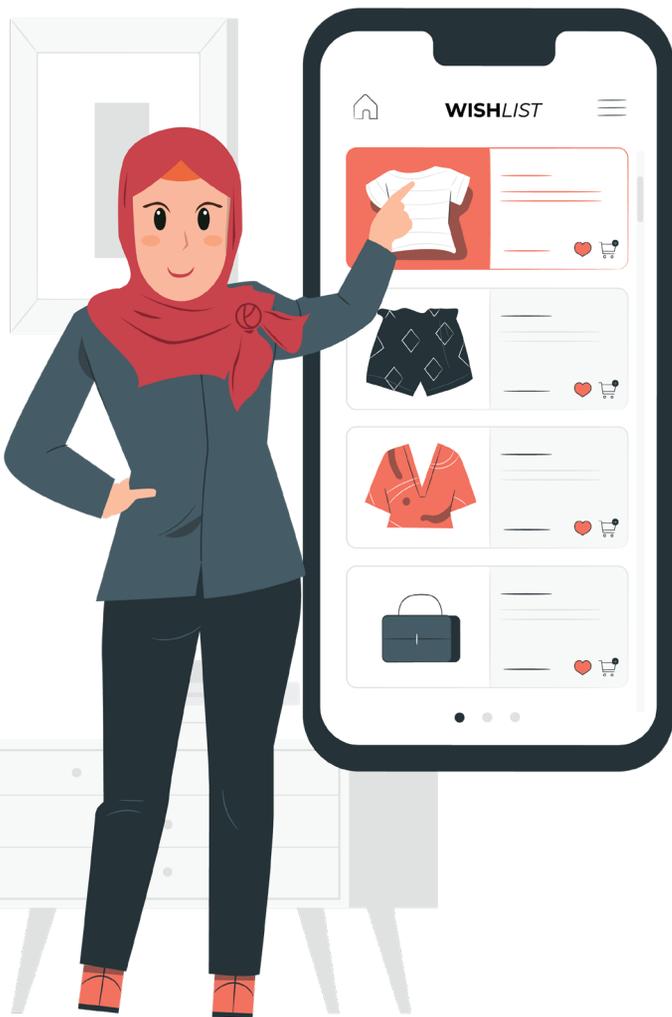
Dalam rangka mengoptimalkan peran BMT untuk mengembangkan UMKM, maka fungsi BMT di bidang penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan produktif perlu lebih ditingkatkan. Sebagai upaya peningkatan dana BMT, maka diperlukan sinergi antara BMT dengan bank syariah. Kekuatan dana dan permodalan yang dimiliki bank syariah sangat dibutuhkan oleh BMT untuk memperluas pembiayaannya. Bentuk sinergi ini disebut dengan program *linkage*.

Dengan modal *linkage* ini akan mempermudah ekspansi lembaga keuangan syariah ke sektor UMKM. Dengan demikian, UMKM juga akan mendapatkan bantuan modal dari LKS sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Semakin UMKM Indonesia maju, maka masyarakat Indonesia juga akan semakin sejahtera.

UMKM Masuk Digitalisasi

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight



Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9 persen merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9 persen yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9 persen dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30 persen. Hanya 3,8 persen UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/ pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan (Katadata.co.id, 2020).

Distribusi dan produksi terhambat saat

pandemi. Perubahan perilaku konsumen juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Maka dari itu pelaku usahanya perlu menyasar digital.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk *on board* ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM *on boarding*. Pada 2030 targetnya jumlah UMKM yang *go digital* akan mencapai 30 juta. Perluasan ekspor produk Indonesia bagi UMKM juga dilakukan melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal (CNBC Indonesia, 28 April 2021).



Dorongan UMKM untuk memanfaatkan platform digital sangat dibutuhkan apalagi pada kondisi pandemi saat ini. Pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan efisiensi serta menambah saluran penjualan/ pemasaran sektor UMKM yang saat ini terbatas akses fisiknya dengan pelanggan/pengguna jasa.

Sertifikasi Halal, Senjata UMKM Ekspor

Sertifikasi halal digadang-gadang menjadi salah satu senjata UMKM Indonesia bangkit. Peralannya, status kehalalan dalam produk UMKM bisa menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) Indonesia di pasar Internasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka isu halal menjadi isu krusial bagi pasar Internasional. Produk dari Indonesia dipercaya dunia karena kehalalannya.

Berdasarkan data *Global Islamic Economy*, Indonesia menempati peringkat kelima pada tahun 2019-2020 dalam kekuatan ekonomi syariah dari 73 negara dunia. Potensi UMKM itu disadari betul oleh pemerintah. UU Cipta Kerja dan di UU Nomor 33 Tahun 2014 pun dibuat untuk menggalakkan UMKM halal.

Pembuatan sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal untuk bisa terus mendukung UMKM Indonesia tidak hanya eksis di dalam negeri namun juga secara global. Pemerintah berharap Indonesia bangkit ekonominya dengan mendorong UMKM untuk memberikan keyakinan pada konsumen dalam negeri maupun luar negeri dalam memproduksi produk-produk halal yang diharapkan makin meningkat dan menjadi yang terbesar di dunia menembus pasar dunia.

Sejarah menunjukkan bahwa UMKM menjadi perwujudan konkret dari kegiatan

Pembuatan sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal untuk bisa terus mendukung UMKM Indonesia tidak hanya eksis di dalam negeri namun juga secara global.



ekonomi rakyat yang bertumpu kepada kekuatan sendiri, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyelamat saat perekonomian Indonesia dilanda krisis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dari 9,22 persen periode September 2019.

Dengan data demikian, angka kemiskinan di Indonesia memang masih terus menunjukkan peningkatan. Sehingga kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Segala upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan terus digalakkan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok UMKM dengan pengembangan *microfinance*, yakni



suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasannya (Amalia, 2009).

Kemampuan UMKM untuk bertahan dalam kondisi krisis dan pandemi Covid-19 terjadi karena kandungan domestik yang tinggi pada input produksinya, sehingga mampu menghindari dari keterpurukan akibat depresiasi rupiah yang menyebabkan peningkatan biaya produksi pada usaha yang menggunakan input impor. Demikian juga keunikan dan kekhasan tertentu dari komoditas yang dihasilkan menjadi nilai lebih yang membuatnya memiliki daya saing lebih di pasar.

Berdasarkan keunggulan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh UMKM, maka

perlu mempersiapkan perencanaan untuk menjadikan UMKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu meningkatkan keunggulan kompetitif nasional. UMKM harus diberi kesempatan dan juga arahan yang berupa informasi akurat untuk menentukan usahanya sendiri seperti produk apa yang akan diproduksi, berapa banyak dan untuk siapa produk ini dipasarkan. Dengan kesempatan yang luas dan arahan yang tepat diharapkan UMKM mempunyai daya saing yang tinggi di pasar lokal, regional maupun internasional. Hal ini tentu harus didukung aspek pembiayaan bagi UMKM. Salah satu sektor yang diharapkan punya peran besar terhadap aspek pembiayaan siapa lagi kalau bukan lembaga keuangan mikro syariah?

Potensi UMKM dalam Membangun Perekonomian yang Terdampak Pandemi



Lukmanul Hakim
Staff Wakil President

Apa yang membedakan UMKM halal dengan UMKM pada umumnya?

UMKM halal itu berarti produknya dari mulai hulu hingga hilir diperhatikan. Artinya dari bahan baku, proses sampai ke pengemasan atau penyajian itu memang sesuai dengan ketentuan halal. Sementara UMKM pada umumnya belum tentu mengikuti atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan halal. Sehingga dalam UMKM halal ini memberikan kepastian hukum kepada konsumennya bahwa memang produknya sesuai dengan ketentuan halal yang ditetapkan dalam syaria Islam.

Apa hal yang menjadi urgensi agar UMKM menerapkan sistem dan sertifikasi halal?

Sekarang sifatnya bukan lagi mau menerapkan sertifikasi halal, tapi sudah

kewajiban. Itu kan perintah Undang-Undang semua harus halal. Pada 2024 itu wajib halal semua UMKM yang ada di Indonesia.

Apa saja pengaruh COVID-19 terhadap pengembangan UMKM halal di Indonesia?

Dampaknya jelas ke pasar. Artinya ekosistemnya terganggu. Dimulai dari hulunya, pengadaan bahan baku, jadi sedikit sulit. Dengan demikian karena *supply*-nya sedikit maka harganya jadi tidak terjangkau. Kalaupun jadi pasarnya kurang tersedia. Karena daya beli masyarakat juga menurun.

Dengan begitu volume *demand* juga jadi berkurang. Itu jadi tantangan berat UMKM kita.

Sekarang sifatnya bukan lagi mau menerapkan sertifikasi halal, tapi sudah kewajiban. Itu kan perintah Undang-Undang semua harus halal. Pada 2024 itu wajib halal semua UMKM yang ada di Indonesia.





Jadi bisak dikatakan, dalam konteks ekosistem ada gangguan. Sementara dari segi masalah penetapan halalnya, sertifikasinya, tidak ada. Pemeriksaan UMKM tetap bisa dilakukan. Cuma masalahnya ada di ekosistem karena terjadi gangguan menurut saya.

Sektor apa yang berpeluang tinggi menjadi fokus pengembangan UMKM halal pada saat dan paska pandemi COVID-19?

Sektor makanan dan minuman (mamin) tentu jadi nomor satu. Karena memang kondisi sekarang belanja rumah tangga sangat difokuskan pada mamin. Banyak orang yang melakukan rasionalisasi pengeluaran, karena memang terjadi ada kontraksi ekonomi. Maka, pengeluaran pun harus dievaluasi. Banyak pengeluaran itu lebih fokus kepada makanan yang dulunya ke sektor rekreasi atau kosmetik, banyak melakukan rasionalisasi.

Jadi otomatis yang menunjukkan tetap stabil itu mamin, meskipun sekarang sektor rekreasi mulai memuncak pada hari tertentu, tapi itu baru, belum permanen. Bahkan, rekreasi sempat turun sampai 70-90 persen. Hotel di atas 70 persen tutup. Sekarang mulai agak keliahahan tumbuh. Tapi tetap mamin yang berpeluang tinggi.

Begitupun sektor kerajinan tangan dan fesyen, jika tidak penting sekali pengeluaran itu untuk sektor itu ditekan.

Bagaimana UMKM halal berperan dalam mendorong kebangkitan perekonomian nasional dan bagaimana potensinya ?

Ini sangat penting jika dimanajemen dengan bagus. Makanya, saya di kantor Wakil Presiden RI melakukan Zoom Series setiap Kamis tentang bagaimana penguatan UMKM halal. Jika dimanajemen dari hulu hingga hillir dengan baik, peningkatan ekspornya sangat

bagus. Saat ini pemerintah sangat total mendukung UMKM. Anggaran itu besar sekali diarahkan ke UMKM.

Kita harus mulai menguatkan ekspor pada sektor UMKM. Ketika ekspor, maka digitalisasi produk UMKM itu menjadi penting maka harus dilakukan.

Dalam perkembangannya, sekarang UMKM yang *on board* terhadap digital itu baru sekitar 25 persen dan yang bisa ekspor baru 14 persen. Jadi, ini harus didorong terus UMKM itu, mengingat UMKM ini jumlahnya di atas 90 persen menggerakkan ekonomi nasional. Jika ini terus didorong maka kesejahteraan masyarakat luas akan meningkat.

On board digital penting untuk perluasan pasar UMKM. Jadi mereka tidak hanya memasarkan di desa atau kecamatannya saja. Dengan digital bisa lebih luas dari itu, bahkan ekspor. Untuk itu UMKM harus didampingi, bahkan *treatment* tentang kualitasnya, kuantitinya, dan kotinyuitinya, kemudian dikurasi pasarnya.



Tantangan ketiga adalah sumber daya manusia yang menjalankannya. Untuk pengawalannya bagaimana? misalnya satu kampus menyelesaikan 1.000 UMKM, berarti sebulan 30.000 UMKM. Nah, ada berapa tempat kampus yang dibutuhkan. Ini juga harus dipikirkan.

Nah, manfaatnya status halal terhadap UMKM bisa sebagai *competitive advantage* bagi produk UMKM Indonesia. Karena Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Maka ketika orang bicara halal itu, ya, Indonesia. Produk dari Indonesia dipercaya dunia karena kehalalannya. Jadi, isu halal ini bisa diangkat sebagai materi persaingan *competitive advantage* keunggulan persaingan UMKM Indonesia.

Apa saja tantangan terbesar dari pengembangan UMKM halal di Indonesia?

Pada 2024 semua harus bersertifikasi halal. Itu jadi tantangan, karena banyak sekali UMKM yang belum masuk kriteria halal. Sementara jumlah UMKM ada sekitar 64 juta. Misalnya saja yang 2024 itu wajib untuk sektor mamin 30 jutanya. Lalu dibagi tiga tahun, berarti sekitar 10 juta per tahun. Itu kan luar biasa banyak sekali

Lalu, apakah kemudian harus dibuat *shortcut*-nya untuk mempercepat? misalnya, deklarasi halal. Saat ini, saya melihat ada beberapa interpretasi tentang deklarasi halal. Bahwa pernyataan halal itu dibuat sendiri. Masa pernyataan halal dinyatakan sendiri. Ini tidak masuk konteks hukum Islam yang benar. Pernyataan halal yang benar itu lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Self declare yang benar cukup pernyataan sendiri tentang penggunaan bahan baku dan prosesnya. Untuk menghindari kesalahan maka dilakukan proses pendampingan tapi ketetapan halalnya harus melalui proses *isbat*, pentapan hukum itu melalui fatwa MUI.

Tantangan kedua adalah biaya. Meskipun di UU Cipta Kerja dan di UU Nomor 33 Tahun

2014 disebutkan bahwa biaya sertifikasi UMKM itu 0 rupiah atau dibebankan kepada APBN dan peraturan Menteri Keuangan sudah menyebutkan bahwa biaya sertifikasi UMKM itu berdasarkan APBN 1 UMKM adalah Rp 1,5 juta. Jadi mengingat jumlah UMKM itu mencapai 64 juta. Ini butuh biaya yang besar sekali.

Tantangan ketiga adalah sumber daya manusia yang menjalankannya. Untuk pengawalannya bagaimana? misalnya satu kampus menyelesaikan 1.000 UMKM, berarti sebulan 30.000 UMKM. Nah, ada berapa tempat kampus yang dibutuhkan. Ini juga harus dipikirkan.

Apa saja hikmah dan hal-hal positif yang dapat diambil dalam kondisi sekarang ini?

Hikmahnya masyarakat jadi melek cara memasarkan lewat digital. Sebagai contoh, hal itu terlihat pada Pesantren Al Itifaq di mana produk sayur-mayurnya bisa ekspor ke Singapura. Jadi, dengan *on board* digital jadi bisa ekspor.

Kemudian, dalam keadaan pandemi Covid-19 masyarakat kereligiusitasnya mendadak meningkat. Karena baru sadar maut itu menempel di tubuh kita. Padahal tanpa seperti itu pun, posisi maut sudah di dekat kita. Apalagi saat *booming*. Setiap hari mendengar di masjid pengumuman orang meninggal. Kereligiusitasan itu juga berdampak ke produk halal. Masyarakat lebih memilih produk halal yang memang sesuai dengan syariat Islam.



Peran KNEKS dalam Mendorong Pengembangan UMKM Halal



Putu Rahdhiwiyasa

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan

1. Apa yang dimaksud dengan UMKM Industri halal?

Sebelum masuk ke Industri Halal perlu diketahui lebih dahulu definisi dari UMKM yaitu sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran mikro, kecil dan menengah. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) mengubah sejumlah ketentuan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Salah satunya, UU Cipta kerja mengubah kriteria UMKM.

Dalam pasal Pasal 87 Poin 1 UU Ciptaker mengubah Pasal 6 sehingga menjadi kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi.

Sedangkan Industri Halal merupakan

istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya maupun cara yang diizinkan oleh syariat islam. Seiring perkembangannya, industri halal bukan hanya mencakup pada makanan dan minuman, tetapi merambah hingga gaya hidup seperti sektor pariwisata, kosmetik, pendidikan, keuangan, mode busana, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan.

Sehingga dapat diartikan bahwa UMKM Industri Halal adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran mikro, kecil dan menengah yang proses usahanya dalam perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya maupun cara yang diizinkan oleh syariat islam. Fokus industrinya pada makanan dan minuman, sektor pariwisata, kosmetik, pendidikan, keuangan, mode busana, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan.

2. Apa strategi KNEKS dalam pengembangan UMKM Industri halal di Indonesia?

Strategi pengembangan UMKM Industri Halal di Indonesia mengacu pada Rencana dan program kerja yang mengacu pada Perpres no. 28 tahun 2020 yang meliputi: 1) pengembangan produk industri halal, 2)

pengembangan industri keuangan Syariah, 3) pengembangan dana sosial Syariah, dan 4) pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah. Pelaksanaan program kerja tersebut dijalankan dalam rangka mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam kurun waktu 2020-2024.

Strategi KNEKS dalam hal pengembangan UMKM adalah:

Pengembangan UMKM yang berdaya saing dan menjadi bagian dari rantai nilai halal global.

Membuat Ekosistem untuk memperkuat UMKM Industri halal dengan melakukan koordinasi lintas sektoral berupa sinergi akselerasi UMKM Industri Halal yang melibatkan 13 lembaga pemerintah maupun swasta yang berkomitmen untuk bekerjasama bagi kemajuan UMKM Indonesia.

Ekosistem tersebut terdiri dari sub ekosistem *Capacity Building & Incubation, Digital empowerment, Market Access, Logistic, Halal Assurance, Funding, Financing/Export Financing dan Partnership*.

Mensosialisasikan melalui website, media sosial dan saluran komunikasi lain yang bisa dijangkau untuk mempelajari videografis 8 modul dasar UMKM Industri halal dengan tujuan untuk bisa merubah pola pikir dan meningkatkan literasi ekonomi syariah sehingga pelaku UMKM termotivasi dengan sendirinya untuk menjalankan usaha secara syariah dan bersertifikasi halal.

Bekerjasama dengan inkubator baik swasta ataupun negeri dan perguruan tinggi untuk membuat sistem pembinaan dan pelatihan yang nantinya akan mampu

Mensosialisasikan melalui website, media sosial dan saluran komunikasi lain yang bisa dijangkau untuk mempelajari videografis 8 modul dasar UMKM Industri halal dengan tujuan untuk bisa merubah pola pikir dan meningkatkan literasi ekonomi syariah sehingga pelaku UMKM termotivasi dengan sendirinya untuk menjalankan usaha secara syariah dan bersertifikasi halal.



mendukung terjadinya sertifikasi halal bagi produk UMKM Indonesia.

Memperkuat kawasan industri halal dan sektor halal lainnya sebagai salah satu mata rantai nilai halal yang dapat mendukung UMKM untuk berdaya saing tinggi dan mendukung percepatan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Penciptaan dan penguatan UMKM untuk siap ke pasar ekspor, diantaranya Membuat Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal, Model Inkubator Ekspor Produk Halal, Kelayakan Rumah Produksi Halal Bersama.

Digitalisasi ekonomi Syariah yang memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

3. Apa saja pengaruh COVID-19 terhadap pengembangan UMKM Industri halal di

Indonesia?

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sekarang disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat

menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih. Pemerintah sejak 2020 mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pemulihan sektor UMKM antara lain penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro.

Hasil survei 20 dari beberapa lembaga seperti BPS, BAPPENAS, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih





Selain itu ada kenaikan positif pada nominal transaksi produk halal lewat e-commerce marketplace tumbuh 49,52% year on year (yoy) dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi produk halal lewat e-commerce marketplace didominasi produk fesyen.

banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility*.

Untuk UMKM Industri Halal di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sebesar 87%, sektor Halal Tourism adalah bidang yang paling merasakan dampaknya yaitu berkurangnya pengunjung (turis), pemberhentian operasi wisata serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain sektor pariwisata halal, sektor Muslim Fashion, F&B atau makanan dan minuman juga mengalami penurunan pasar. Akan tetapi masih ada peluang meningkat di antaranya industri masker baik medis maupun kain, APD dan untuk sektor F&B Halal banyak yang beralih ke sistem *take away*. Selanjutnya untuk sektor *supplement* dan obat tradisional halal

diprediksi dapat terus meningkat pasarnya dan memperoleh peluang untuk dikembangkan lebih luas lagi dimasa pandemi ini.

Selain itu ada kenaikan positif pada nominal transaksi produk halal lewat e-commerce marketplace tumbuh 49,52% year on year (yoy) dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi produk halal lewat e-commerce marketplace didominasi produk fesyen. Secara total, di sepanjang tahun 2020 transaksi produk halal didominasi oleh produk fesyen dengan pangsa mencapai 86,63%. Program pembatasan aktivitas berdampak pada pergeseran metode belanja ekspor fesyen sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan penjualan produk fesyen secara online pada masa pandemi bahkan relatif kontras dengan penjualan secara *offline*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 15% pelaku usaha di bidang logistik halal mengaku tidak terdampak pandemi tersebut. Bahkan, sebanyak 10% pelaku usaha malah menerima dampak positif dari adanya pandemi.

Pandemi Covid-19 memang berdampak besar pada penurunan perekonomian nasional termasuk sektor UMKM. Namun tetap optimis di beberapa sektor Industri Halal tetap bertumbuh dan tentu saja harus diiringi dengan perubahan pola pikir *Hygiene, Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility* untuk ciri bisnis baru yang tentu saja harus diimbangi dengan pembinaan UMKM mengarah pada hal tersebut, seperti keahlian *digitalisasi*, pembinaan tentang konsep halal dan *thoyib* untuk menjadikan produk sehat dan higienis serta bermutu. Alhamdulillah, seiring menurunnya jumlah penularan Covid-19 dan berjalannya program vaksinasi menumbuhkan optimisme sektor UMKM dapat pulih pada

tahun 2021 ini. Sejalan dengan dukungan dan perhatian pemerintah, kementerian, lembaga dan organisasi masyarakat maupun swasta guna memulihkan UMKM Industri Halal agar momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini dapat terwujud.

4. Apa perbedaan strategi pengembangan UMKM Industri halal sebelum dan sesudah pandemi?

Pandemi Covid-19 telah mendorong transformasi digital di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM. Kebijakan pembatasan sosial serta perubahan pola konsumsi masyarakat memaksa UMKM untuk mengubah operasional usaha dengan menggunakan *platform* digital untuk pemasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Delloite Access Economics menunjukkan hambatan transformasi digital bagi UMKM di Indonesia. Sebanyak 36% UMKM di Indonesia masih menggunakan metode pemasaran konvensional dan hanya 18% UMKM yang dapat menggunakan media sosial dan website untuk mempromosikan produknya. Sementara itu, sebanyak 37% UMKM hanya mampu mengoperasikan komputer dan internet secara sederhana. Penelitian dari Danareksa Research Institute juga menunjukkan hal serupa, 41,67% UMKM di DKI Jakarta sudah menggunakan media sosial dan pemasaran digital dalam operasional usaha. Sedangkan hanya 29,18% UMKM di Pulau Jawa dan 16,16% UMKM di luar Pulau Jawa yang sudah memanfaatkan pemasaran digital.

Salah satu sektor usaha UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah kuliner. Riset dari Paper.id dan SMESCO menunjukkan 43,09% UMKM di sektor kuliner mengalami penurunan omset. Terutama pelaku

usaha yang menjual produk-produknya secara tatap muka seperti bisnis catering. Akan tetapi disaat yang bersamaan, UMKM kuliner masih mampu bertahan dan tumbuh karena permintaan dari masyarakat yang beralih membeli kebutuhan yang awalnya dilakukan secara langsung menjadi secara online.

Digitalisasi memberikan peluang untuk mempertahankan kelangsungan UMKM, misalnya dengan membuka pasar baru. Digitalisasi juga dapat dipercepat kalau pihak-pihak yang berwenang bersinergi, seperti kerangka kerja Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal yang telah diluncurkan Wakil Presiden selaku Ketua KNEKS pada 25 Agustus 2021.

Kerangka kerja Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal ini merupakan peluang untuk secara sistematis dan terstruktur melakukan pendekatan strategis untuk mengembangkan UMKM secara holistik dengan akselerasi digital. Oleh karenanya, suatu mekanisme perlu dibangun dengan baik dan diterapkan untuk men-sinergikan berbagai inisiatif dan meng-koordinasikan berbagai usaha untuk mengembangkan, menumbuhkan, dan memberdayakan UMKM secara digital di Indonesia. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan kinerja bisnisnya secara menguntungkan dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

5. Sektor apa yang menjadi fokus pengembangan UMKM Industri halal pada saat dan paska pandemi COVID-19?

Salah satu sektor yang diharapkan

memberi sumbangan signifikan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia adalah sektor halal. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sektor halal memiliki ketahanan yang cukup baik di masa pandemi. Pada 2020, di saat perekonomian Indonesia terkoreksi cukup dalam sebesar 2,1%, sektor halal tercatat hanya mengalami koreksi sebesar 1,7%.

Mengingat sektor halal kebanyakan dijalankan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah juga memperkuat komitmennya untuk pengembangan UMKM melalui turunan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu lewat penerbitan PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, kemudahan perizinan berusaha, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan. Dengan harapan bahwa semua kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh P2ELIPI, didapatkan bahwa dampak penurunan ekonomi terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%, sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1.77% dan usaha menengah sebesar 0.07%. Hal ini menggambarkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam menurunkan perkembangan UMKM khususnya pada sektor kuliner atau makanan dan minuman. Lalu Badan

Pusat Statistik ditahun 2020 sempat mencatat berdasarkan sektornya, usaha akomodasi dan makan/minum merupakan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yakni 92,47%.

Namun dari segi konsumsi rumah tangga Indonesia tahun 2020 Industri makanan dan minuman pada tahun 2020 masih bisa tumbuh positif. Pada Triwulan ke-3 tahun 2020, industri makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar pada PDB nasional, yaitu sebesar 7,02%. Sub kuliner memberikan kontribusi cukup besar yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Aktivitas dari konsumsi kuliner halal di Indonesia memiliki dominasi cukup besar dalam pasar Syariah global. Hal ini terbukti dengan perolehan peringkat pertama Indonesia sebagai Muslim Food Expenditure sebesar \$144 Miliar pada tahun 2019. Hal ini dapat dijadikan potensi untuk memperluas pasar makanan dan minuman halal di Indonesia. Potensi Zona Kuliner halal menjadi salah satu rancangan dalam pengembangan UMKM yang akan membantu meningkatkan mutu UMKM Kuliner halal dan *thoyyib*.

6. Apa saja target-target pengembangan UMKM Industri halal pada saat dan paska pandemi COVID-19?

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap daya tahan UMKM. Sejumlah kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi terutama mengenai pembatasan aktivitas fisik yang berlangsung cukup lama, mengakibatkan sebagian besar bisnis UMKM tidak dapat beroperasi secara normal, sehingga tidak hanya berdampak terhadap penurunan pendapatan, namun juga

menggerus permodalan UMKM. *Survey* yang dilakukan oleh BPS secara triwulanan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 terhadap Industri Menengah dan Kecil (IMK) menunjukkan pertumbuhan produksi IMK selama periode 2020 mengalami kontraksi cukup dalam yaitu sebesar -17,63%. Sebanyak 11,25% usaha IMK yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi, umumnya melakukan kebijakan sementara tidak berproduksi. Pandemi terus mengikis daya tahan usaha IMK, penutupan usaha sejumlah IMK terus bertambah sepanjang tahun 2020 hingga mencapai angka 7,06% pada akhir tahun. Hanya sebagian kecil saja dari kelompok kegiatan usaha yang justru mampu menangkap peluang di masa pandemi ini. Kelompok usaha industri ini adalah industri yang berperan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti industri farmasi, obat dan obat tradisional, dan industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia.

Oleh karena itu, sebagai upaya dalam mengatasi dampak pandemi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu sasaran PEN adalah pemulihan UMKM yang dilakukan melalui tiga program utama yaitu (1) pemberian stimulus kredit UMKM, yang telah berhasil menyalurkan subsidi bunga sebesar Rp 34,15 Triliun melalui sejumlah lembaga keuangan (perbankan, perusahaan pembiayaan, pegadaian, PNM, LPDB dsb); (2) pemberian insentif pajak (PPH 21 DTP, PPh Final UMKM DTP), telah disalurkan sebesar Rp 28,06 Triliun dan (3) penjaminan untuk pemberian kredit modal kerja baru UMKM yang telah disalurkan sebesar Rp 6 Triliun.

Oleh karenanya, fokus pengembangan

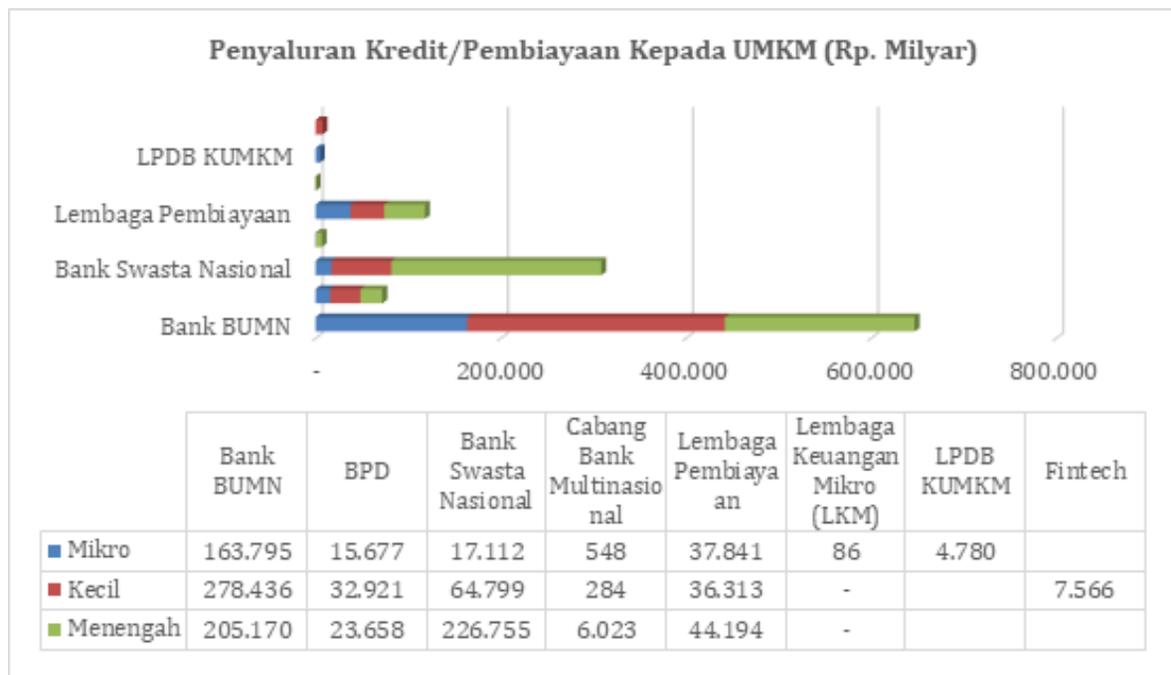
UMKM saat ini adalah **pertama, penguatan struktur permodalan UMKM**, terutama untuk memperkuat daya tahan UMKM terhadap dampak dari pandemi telah menjadi *concern* dari berbagai *stakeholder*. Berbagai lembaga keuangan di tanah air telah menyalurkan pendanaan bagi UMKM. Namun demikian, pendanaan yang telah disalurkan kepada UMKM tersebut masih belum mencukupi kebutuhan permodalan UMKM secara keseluruhan. Secara umum, pendanaan terhadap UMKM masih didominasi oleh pendanaan yang bersumber dari perbankan, sedangkan perbankan memiliki banyak keterbatasan dari segi infrastruktur maupun preferensi risiko untuk menjangkau segmen UMKM yang “*unbankable*”. Oleh karena itu, salah satu fokus strategi dalam peningkatan akses terhadap permodalan bagi UMKM adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang keuangan (*financial technology*) untuk memperluas inklusi finansial bagi UMKM yang belum dapat dilayani oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Salah satunya melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah, yaitu pendanaan untuk bisnis maupun proyek UMKM industri halal melalui penghimpunan dana investor retail dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi yang bersifat terbuka (*online*), dengan demikian diharapkan UMKM memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari investor yang lebih luas.

Fokus pengembangan selanjutnya adalah **transformasi digital UMKM industri halal**. Pandemi menjadi katalisator penggunaan teknologi digital yang mengubah lanskap industri dan peta persaingan dalam bisnis. Oleh karena itu, UMKM perlu beradaptasi dan mengadopsi teknologi dalam proses bisnisnya,

baik dalam proses produksi, distribusi maupun pemasaran. Penggunaan teknologi digital dalam proses produksi mungkin membutuhkan investasi yang cukup besar di depan, namun secara jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi UMKM terutama dalam hal efisiensi (biaya produksi dan tenaga kerja) dan kecepatan/waktu produksi. Demikian juga dalam hal distribusi produk, selama masa pandemi konsumen lebih memanfaatkan *e-commerce* untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu UMKM perlu mengoptimalkan *e-commerce* disamping saluran distribusi

tradisional (*offline*) yang dimiliki. Dalam hal pemasaran, UMKM harus jeli memanfaatkan *online platform* baik website maupun *social media* untuk melakukan promosi dan menjangkau target *customer* yang tepat.

Ketiga, **peningkatan ekspor UMKM industri halal**. Perkembangan industri dan produk halal global semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk halal. Menyongsong Indonesia sebagai pusat halal dunia pada tahun 2024, pemerintah menargetkan tiga sektor industri utama untuk ekspor produk



Sumber : Statistik SPI dan IKNB OJK periode Juni 2021 serta website LPDB posisi Oktober 2021

halal yaitu (1) makanan dan minuman halal; (2) modest fashion halal; (3) farmasi dan kosmetik halal. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun kontribusi UMKM terhadap ekspor masih perlu ditingkatkan. Menurut data dari Kemenkop-UMKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor non-migas pada tahun 2021 sebesar 14% dan akan terus ditingkatkan sehingga pada akhir tahun ini dapat mencapai 15,2%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional diperlukan berbagai upaya diantaranya (1) model inkubator dan pembinaan bagi UMKM ekspor yang tepat dan komprehensif sesuai dengan kondisi UMKM ekspor; (2) sinergi dan koordinasi antar *stakeholder* dalam melakukan promosi dan pemberian insentif yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekspor UMKM; (3) *export legal issue* dan sertifikasi produk dari UMKM sesuai persyaratan ekspor dari negara tujuan ekspor potensial (4) penyediaan pendanaan bagi UMKM ekspor.

7. Potensi, Kontribusi dan Peran UMKM Industri halal Dalam Mendorong Kebangkitan Perekonomian Nasional

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Jaringannya tersebar ke berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas, sehingga kehidupan mereka berkembang menjadi lebih baik.

Indonesia dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia sudah seharusnya dapat menjadi penggerak perekonomian syariah dan tidak hanya menjadi target market dan produk industri halal negara lain. Indonesia sudah semestinya menjadi pusat produsen

halal dunia, bukan sekadar konsumen produk halal terbesar di dunia. Seperti yang diketahui, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM per Maret 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia. UMKM secara umum tentunya juga tidak akan lepas dari UMKM industri halal mengingat sebagian besar bisnis UMKM adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga mengamanatkan hampir semua produk barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal.

Potensi dan peluang UMKM industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim potensial. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen Muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti norma subjektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen Muslim Indonesia harus lebih didalami agar UMKM industri halal Indonesia dapat berperan maksimal di pasar dalam negeri dan ekspor di saat yang bersamaan. Potensi konsumen Muslim tidak hanya ada di Indonesia. Negara – negara Teluk dan Asia Tenggara pun dapat menjadi tujuan ekspor produk-produk industri halal Indonesia.

Potensi lainnya adalah pengelolaan UMKM industri halal berbasis teknologi. Beberapa pionir industri halal di Indonesia mengawali usahanya dari ekonomi berbasis digital, industri perdagangan retail, sampai yang bergerak dalam penyebaran informasi untuk penduduk pedesaan.

8. Tantangan Terbesar Dari Pengembangan UMKM Industri halal Di Indonesia

Sektor perbankan nasional sudah menyalurkan setidaknya 20 persen dana pihak ketiga terhadap UMKM keseluruhan (data privat dari Bank Indonesia). Bank BUMN, syariah maupun konvensional, menyumbang 50 persen dari penyaluran dana ini. Akses pendanaan ini perlu dibuka lebih lebar untuk UMKM agar mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Hambatan pendanaan ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam praktiknya penyaluran kepada UMKM masih minim. Padahal, sumber pendanaan tidak hanya dari perbankan. Lembaga keuangan non-bank pun masih banyak beroperasi di Indonesia dan dapat dijadikan sumber pendanaan jika dikelola dengan baik.

Misalnya, *fintech* dan modal ventura syariah. PNM Ventura Syariah, yang merupakan perusahaan BUMN menggunakan skema modal ventura syariah dalam pembiayaannya. PNM ini selama beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan menemukan nasabah yang terkategori sebagai benar-benar syariah. Akan tetapi, dana yang akan disalurkan oleh PNM Ventura Syariah juga terbatas, sehingga kurang leluasa mengembangkan kegiatan bisnis. Selain itu, dari sudut pandang

Potensi dan peluang UMKM industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim potensial. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen Muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti norma subjektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas.



pengusaha Muslim, adanya keraguan atau minimnya pengetahuan kepada lembaga keuangan syariah menghambat pelaku usaha untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang ada.

Hambatan selanjutnya adalah mengenai sertifikasi halal. Esensi dari industri halal adalah adanya jaminan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan sudah halal dan aman dikonsumsi khususnya untuk konsumen Muslim. Berdasarkan data Kementerian K-UKM, terdapat 1.500 UMKM sedang dalam bantuan mendapatkan sertifikasi halal, merek, hak cipta, dan lain-lain. Di lapangan, kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah mahalnya proses sertifikasi halal sehingga tidak semua pelaku usaha mampu mengajukan. Padahal, Kementerian K-UKM menjelaskan

adanya sertifikasi halal gratis, tapi peminatnya tidak juga banyak. Pemerintah menyatakan tetap harus menjalankan sistem jempot bola. Di sini terlihat adanya kesenjangan antara inisiatif pemerintah dengan yang dirasakan pengusaha UMKM.

Selain kendala harga, banyak pelaku usaha yang tidak sadar tentang syarat dan ketentuan sesuatu hal dikategorikan halal. Secara umum, yang disebut halal adalah hal-hal yang tidak mengandung alkohol dan babi. Padahal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa yang disebut halal juga mencakup segala hal yang tidak mengandung zat-zat yang dapat merusak tubuh.

Kendala BPJPH adalah kurang tersedianya data yang terpusat dan lengkap mengenai UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal sebagai sasaran sosialisasi. Selain data, kendala lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan dan pengecekan proses halal dari hulu ke hilir. Saat ini misalnya, kurangnya tenaga pengawas untuk rumah potong hewan dan di pasar-pasar tradisional.

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) menyatakan bahwa adanya kondisi yang kurang nyaman untuk pemilik usaha yang belum memiliki sertifikasi halal karena adanya desakan untuk segera memiliki sertifikasi. Akan tetapi anjuran untuk memiliki sertifikasi ini masih menjadi bahan pertimbangan oleh para pelaku usaha karena alasan bisnis. Pelaku usaha melihat tidak tingginya kesadaran pelanggannya terhadap label halal yang dimiliki sehingga mereka merasa tidak memerlukan sertifikasi halal untuk mengembangkan bisnis. Pelaku usaha tidak melihat adanya jaminan bahwa produk yang sudah tersertifikasi halal

sudah pasti lebih laku, sehingga belum tentu biaya sertifikasi akan tertutup dari penjualan selanjutnya.

Kendala lain untuk industri halal adalah kurang adanya karakter SDM yang dirasa baik. Lulusan yang ada saat ini, terlihat bekerja di lembaga keuangan syariah, sebagian besar tidak bekerja karena *passion*, akan tetapi karena kebutuhan keuangan. Kurangnya karakter-karakter memajukan industri keuangan syariah menjadi acuan bahwa harus ada pendidikan karakter yang baik untuk lulusan ekonomi Islam untuk dapat membantu memajukan industri halal Indonesia. Selain itu, banyak lulusan ekonomi Islam tidak terserap ke lapangan pekerjaan. Otoritas Jasa Keuangan menyarankan adanya diskusi kurikulum dari Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi ketenagakerjaan yang lain untuk mempersiapkan lulusan-lulusan dengan keahlian yang tepat.

Sementara permasalahan dari sisi bisnis, UMKM kesulitan mencari mentor untuk konsultasi pengembangan bisnis, agar bisa naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil menjadi usaha menengah, serta dari usaha menengah menjadi usaha besar. Pelaku bisnis UMKM memerlukan pendampingan untuk mengembangkan bisnis agar lebih bisa bersaing di ekonomi digital. Situs belanja daring seperti Bukalapak memiliki sarana mempertemukan lembaga pembiayaan syariah untuk UMKM, akan tetapi masih sedikit pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut. Dari pernyataan ini, terlihat indikasi kurang familiarnya pelaku usaha UMKM Indonesia terhadap layanan keuangan digital yang berpotensi menjadi sumber modal untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan uraian di atas dan informasi tambahan yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion*, terdapat enam isu yang teridentifikasi, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya produk halal.
2. Perlunya pendampingan untuk menambah kemampuan manajerial para wirausahawan untuk dapat melakukan *value creation*.
3. Pembiayaan atau penyaluran dana untuk UMKM, baik dari sisi penyalur yang persyaratannya tidak aplikatif untuk UMKM, maupun dari sisi minimnya pengetahuan pemohon dana tentang lembaga keuangan syariah.
4. Infrastruktur di sekitar kegiatan usaha yang masih belum berpihak, seperti izin usaha yang terkesan lambat, tenaga kerja yang minim keahlian, kurangnya insentif perpajakan, dan kemudahan akses fasilitas

untuk melakukan inovasi produk.

5. Belum adanya platform digital terpadu yang mendata UMKM industri halal termasuk jenis usaha, produk, dan lokasinya, serta yang bisa mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan finansial dengan pihak yang mengalami kelebihan dana.
6. Kurangnya akses terhadap hasil penelitian dan pengembangan yang menggunakan teknologi untuk memaksimalkan produk (*output*).

9. Hikmah dan Hal-Hal Positif Yang Dapat Diambil Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Desember 2019, membawa dampak negative terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bahkan mengakibatkan melambatnya perekonomian di beberapa negara. Namun pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan dampak buruk. Hal ini sejalan dengan Al-Quran yang menyebutkan bahwa dalam setiap kesusahan pasti disertai kemudahan, atau dengan kata lain ada hikmah dan hal-hal positif yang bisa kita petik. Adapun hikmah dan hal-hal positif yang dapat di petik dari pandemi Covid-19, yaitu:

1. **Terbukanya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal membawa nilai potensial terhadap pasar produk halal.**

Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa gaya hidup halal semakin relevan. Apalagi gaya hidup halal terbukti sesuai dengan praktik-praktik yang dibuat oleh para pakar dalam new normal. Sekarang ini seluruh masyarakat,



Potensi dan peluang UMKM industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim potensial. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen Muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti norma subjektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas.

termasuk yang bukan muslim, mulai memilih produk halal dan menerapkan gaya hidup halal. Hal ini membuktikan bahwa gaya hidup halal dapat menjadi alternatif terbaik untuk peningkatan kualitas hidup seorang manusia (bukan hanya Muslim). Sebagai contoh untuk mencuci tangan. Seorang muslim yang menerapkan gaya hidup halal harus mencuci tangan, berkumur-kumur dan mencuci hidungnya minimal 5 kali sehari saat berwudhu. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup yang saat ini sangat dianjurkan untuk diterapkan di era dan paska pandemi, sebetulnya sudah diajarkan oleh Islam sejak lama.

Gaya hidup halal menjadi praktik hidup terbaik berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Walaupun bersumber dari nilai-nilai Islam, gaya hidup halal dapat diterapkan oleh siapapun karena sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Contohnya pola hidup bersih dan sehat, makan secukupnya dan tidak berlebihan, senantiasa berbagi dengan sesama, berpakaian dan berpenampilan sopan adalah gaya hidup yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dari karakteristiknya yang seperti itu, maka tidak heran gaya hidup halal merupakan pasar yang potensial. Negara-negara di dunia mengembangkan industri gaya hidup halal atau yang disebut juga industri halal karena pasarnya yang potensial. Saat ini banyak pengusaha non-muslim yang giat memproduksi produk halal karena mengerti ada peluang besar dalam pasar produk halal, mengingat bahwa Islam merupakan salah satu agama terbesar di

dunia.

Negara-negara non-muslim saat ini mulai focus mengembangkan aspek halal dan syariah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh, seperti Selandia Baru yang menjadi salah satu pengeksport daging halal terbesar di dunia menyalurkan 65% daging halal ke negara-negara non-muslim. Selain itu, ada Thailand yang mengklaim sebagai *Halal Kitchen of the world*, Korea sebagai *World's Main Destination of Halal Tourism*, Cina sebagai *the Highest Modest (Halal) Clothing Export*, Jepang menjadikan *Halal Industry as Key Economic Contributor by 2020*, Australia sebagai *the Largest Supplier of Halal Beef in the world*, Brazil sebagai *the Largest Supplier of Halal Poultry*, serta Inggris sebagai *Islamic Finance Hub of the west*.

2. Kreativitas yang Semakin Tanpa Batas beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Di masa pandemi, banyak keterbatasan yang dialami oleh orang-orang dalam bergerak dan beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya menjadi tidak normal dan merubah gaya hidup kita. Akan tetapi, hal tersebut justru menjadi pemicu bergeliatnya ide-ide kreatif yang bisa diterima dan menjadi solusi dalam keterbatasan dan ketidaknormalan.

Beberapa pelaku industri banyak yang merubah konsep produknya dengan menciptakan produk-produk yang dibutuhkan di masa darurat ini. Ada pelaku UMKM yang menciptakan produk penangkal tersebarnya virus, seperti masker anti air, *face shield*, jamu empon-



Pandemi Covid-19 ini terjadi di zaman dengan teknologi tinggi dan semakin berkembang. Walaupun di rumah saja, tetapi aktivitas seminar, diskusi, kajian, konser, semuanya bisa dinikmati secara online. Banyak sekali orang-orang yang berbagi ilmunya secara gratis melalui social media, dengan content atau live streaming.

empon, wadah cuci tangan dan modifikasi *fashion* untuk memudahkan konsumen untuk beraktivitas keluar dengan aman.

Selain itu, banyak juga bisnis-bisnis yang mulai berkembang dengan memanfaatkan platform digital. Misalnya saja menjual layanan streaming untuk pernikahan, layanan sewa platform untuk *meeting online*, *Event Organizer online*, dsb. Kreatifitas para pelaku industri akan menjadi tuntutan untuk bertahan di setiap keadaan. Bisa jadi, saat inilah ketahanan para pelaku industri diuji untuk lebih kreatif dan solutif.

Adanya aturan untuk selalu tinggal di rumah juga menyebabkan timbulnya

kebutuhan dalam teknologi komunikasi. Jasa berbasis digital yang menawarkan kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan hidup juga banyak bermunculan. Selain itu, teknologi *touchless* juga mulai diterapkan di pusat perbelanjaan dan hotel. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi di era pandemic sangatlah pesat.

3. Semangat Berbagi Ilmu Melalui Platform Online.

Sejak pandemi Covid-19, sekolah diliburkan dan aktivitas perkantoran pun menjadi sangat terbatas. Aktivitas masyarakat menjadi terpusat di rumah termasuk para pelajar yang harus belajar dari rumah secara online. Begitupun karyawan yang akhirnya membawa pekerjaan ke rumah dan pertemuan pun diatur secara online. Semua aktivitas berpusat di rumah karena hanya di rumahlah tempat yang paling aman saat ini.

Pandemi Covid-19 ini terjadi di zaman dengan teknologi tinggi dan semakin berkembang. Walaupun di rumah saja, tetapi aktivitas seminar, diskusi, kajian, konser, semuanya bisa dinikmati secara online. Banyak sekali orang-orang yang berbagi ilmunya secara gratis melalui social media, dengan *content* atau *live streaming*. Kebiasaan ini, akhirnya membangun kultur baru untuk berbagi ilmu dan pesan positif pada masyarakat. Mulai dari dokter, dosen, pebisnis, seniman, dsb, semuanya berlomba-lomba saling membantu dan mendukung agar masyarakat bisa bertahan dan tetap produktif di tengah Covid-19 ini.

OPTIMALISASI 4-SI DALAM PENGEMBANGAN UMKM DAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA



Rahmad Hakim

Kaprodi Ekonomi Syariah, Ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Universitas Muhammadiyah Malang

UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan industri halal di Indonesia, sebab secara kuantitas dan kualitas. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangatlah signifikan, khususnya dalam pengurangan angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan konsumsi rumah tangga yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Negara.

Berdasarkan rilis data Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap

97% dari total tenaga kerja yang ada (116 juta orang), serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pada tahun 2018, UMKM tercatat telah menyumbang 60,34% produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Di masa pandemi Covid-19 ini, peran UMKM justru menemukan momentumnya. Dengan adanya UMKM dampak di sektor ekonomi masih dapat di tangani secara seksama.

Pandemi covid-19 merubah preferensi konsumsi para konsumen. Berdasarkan rilis data mc Kinsey, di masa pandemi perubahan preferensi konsumen indonesia terjadi pada lima aspek penting, pertama bahwa kebutuhan para konsumen, sebesar 40% (persen), beralih kepada kebutuhan pokok dan dasar, seperti: makanan, kesehatan dan kebutuhan sehari. *Kedua*, lebih dari 60% konsumen, melakukan migrasi media transaksi dan sosialisasi kepada digital dan multimedia online/daring lainnya. *Ketiga*, sebesar 92% terjadi perubahan loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. *Keempat*, aktivitas keseharian yang “tetap di rumah” telah dilakukan oleh 78% masyarakat Indonesia. *Kelima*, 87% keluarga di Indonesia melakukan *reallocating* (alokasi ulang) dan *rescheduling* (penjadwalan ulang) untuk agenda liburan mereka.

Beberapa hal di atas mengakibatkan “perubahan total” preferensi konsumen di Indonesia. Sebab perubahan preferensi konsumen, mengakibatkan perubahan perilaku para produsen dalam menjual produk

mereka, tak terkecuali bagi UMKM. Bukankan konsumen (pembeli) adalah (memang) Raja?.

RESPON OPTIMAL DENGAN 4-IS

Melihat adanya fenomena yang terjadi dewasa ini, maka diperlukan sebuah respon kongkrit dalam rangka menyongsong perubahan baru yang terjadi, khususnya dalam rangka pengembangan UMKM dan industri halal di Indonesia, terlebih jika Indonesia bertekad untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia pada 2024, sebagaimana yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu.

Setidaknya Indonesia memiliki tiga modal berharga dalam mewujudkan visi 2024 tersebut, pertama, jumlah populasi Muslim yang terbesar di dunia (219 juta penduduk) setara dengan 12,6% dari total populasi Muslim dunia. Hal ini setara dengan 87,2% dari total populasi warga negara Indonesia (Pew Research Center, 2019)

Kedua, meningkatnya kesadaran umat Muslim akan gaya hidup halal (*halal lifestyle*). berdasarkan rilis Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies (CHCS), dinyatakan bahwa 72,5% konsumen Muslim memiliki kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan halal. Hal ini menjadi landasan ideologis, mengapa halal menjadi tren beberapa tahun terakhir.

Ketiga, fenomena global yang sedang 'demam' halal disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu faktor ekonomi dan ideologi. Berdasarkan rilis dalam state of the global economy Report 2018/2019, dinyatakan bahwa jumlah transaksi industri halal pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai \$3,007 Triliun. Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah kelas menengah (*middle class economy*) dunia, sehingga hal ini meningkatkan jumlah wisatawan Muslim Global sebesar 3 juta jiwa

pada tahun 2019, sementara Indonesia telah dikunjungi oleh 3,5 juta wisatawan sepanjang tahun 2019.

Selain itu, pandemi juga mengakibatkan tingkat religiusitas masyarakat Indonesia meningkat, sehingga diasumsikan minat terhadap gaya hidup halal juga meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor penting kebangkitan UMKM dan industri halal di Indonesia. Berdasarkan rilis data Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Republik Indonesia Tahun 2021 yang melakukan survey daring kepada 1.550 yang terdiri dari para penderita covid-19, penyintas dan masyarakat di 34 Provinsi. Telah terjadi peningkatan religiusitas masyarakat di masa pandemi sebesar 81%.

Dalam langkah kongkrit yang diperlukan, setidaknya diperlukan 4-IS agar UMKM dan Industri halal berdampak secara optimal, terutama di masa pandemi covid-19 ini.

Sekarang sifatnya bukan lagi mau menerapkan sertifikasi halal, tapi sudah kewajiban. Itu kan perintah Undang-Undang semua harus halal. Pada 2024 itu wajib halal semua UMKM yang ada di Indonesia.



Pertama adalah sertifikasi. Fenomena peningkatan kesadaran gaya hidup halal (*halal lifestyle*) harus disambut dengan baik, yaitu dengan peningkatan kuantitas dan jumlah produk-produk yang telah memiliki sertifikat halal. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan domestik, dimana umat Islam di Indonesia berjumlah sangat besar. Dengan minimnya produk halal, maka sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini sebagian besar kebutuhan masyarakat (baik dalam produk halal) berasal dari produk impor, sebut saja buah-buahan, daging, telur, jagung dan lain sebagainya.

Hal ini tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021, pada sektor makanan halal (Halal Food) Indonesia berada di peringkat keempat dengan skor 71,5 poin. Sementara peringkat pertama masih ditempati Malaysia dengan skor 209,8, dilanjutkan dengan Singapura dengan skor 125,2 poin, dan Uni Emirat Arab yang memiliki skor 104,4 poin pada peringkat ketiga.

Dalam hal sertifikasi, telah banyak dilakukan pelatihan hingga pendampingan menuju pengajuan sertifikast halal oleh barbagai pihak. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga telah melakukan kebijakan penting dengan melakukan inovasi kebijakan guna percepatan waktu dan efisiensi biaya pengajuan sertifikat halal bagi para pedagusaha.

Kedua, digitalisasi. Gerakan digitalisasi UMKM merupakan hal yang tidak bisa di hindari saat ini. Sebab tanpa digitalisasi maka UMKM akan digilas oleh zaman. *No digital, no point and profit*. Platform digital tidak hanya sekedar

mengembangkan UMKM sendiri, namun juga dapat membantu perekonomian Indonesia.

Berdasarkan rilis data Kompas Tahun 2021, jumlah UMKM yang telah berproses menuju digital (*on boarding*) mencapai 15,3 juta atau 23,9%. Di masa pandemi, terjadi kenaikan sebesar 7,3 juta UMKM. Pada tahun 2024, inklusi digital UMKM dapat mencapai 30 Juta. Pada tahun 2025, potensi digital Indonesia di proyeksikan mencapai US\$ 124 miliar atau lebih dari Rp1.700 triliun. Dengan proyeksi ini, UMKM di Indonesia akan menjadi penggunaan e-commerce tertinggi se-Asia Tenggara.

Beberapa manfaat digitalisasi diantaranya adalah, *pertama*, kemudahan jangkauan konsumen terhadap produk. *Kedua*,



kemudahan dalam membangun jejaring dan *brand awareness* sebuah produk. *Ketiga*, digitalisasi dapat menjadikan harga produk terjangkau dan juga produsen mencapai efisiensi dan efektifitas dalam proses produksi. Singkat kata, sebenarnya digitalisasi adalah penting, perlu dan menguntungkan.

Ketiga, kolaborasi. Sebuah adagium menyatakan, era disrupsi (digitalisasi) adalah era kolaborasi. dalam rangka pengembangan UMKM di Indonesia, perlu adanya kolaborasi antar berbagai pihak baik lintas kementerian, lembaga, instansi, dan swasta seperti Kementerian BUMN, Keminfo, Kemenparekraf, Kemendag, dan Kemenkop UKM. Kolaborasi juga perlu dilakukan oleh sejumlah lembaga

ekonomi dan keuangan syariah seperti Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), MUI, BPKH, BPJPH, BAZNAS, BWI, dan lainnya.

Tanpa adanya kolaborasi pada pihak user, regulator, operator maka optimalisasi peran UMKM dan Industri halal akan jauh panggang dari api. Upaya kolaborasi ini juga di dasarkan kepada Keputusan Presiden (Kepres) No. 15/2021, pada 8 September 2021 tentang pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dalam rangka kolaborasi, *Pilot Project* sinergi akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal telah dicanangkan dalam bentuk pembiayaan untuk mengembangkan bisnis dari bank syariah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR), saham, dan *financial technology (fintech)* yang sesuai syariah.

Keempat, sosialisasi. Berdasarkan rilis data Bank Indonesia (BI) tahun 2020, indeks Literasi Eksyar nasional tahun 2019 mencapai 16,3 persen. Hal ini menyiratkan bahwa sosialisasi terkait dengan produk syariah dan halal penting dan perlu untuk di tingkatkan. Tentu pemangku kepentingan dari program sosialisasi adalah seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan tinggi maupun pegiat ekonomi syariah dan halal di Indonesia.

Pada akhirnya, optimalisasi 4-Si (sertifikasi, digitalisasi, kolaborasi, sosialisasi) dapat menjadi turning point dalam upaya pengembangan UMKM dan Industri Halal Di Indonesia.



Beberapa manfaat digitalisasi diantaranya adalah, pertama, kemudahan jangkauan konsumen terhadap produk. Kedua, kemudahan dalam membangun jejaring dan brand awareness sebuah produk. Ketiga, digitalisasi dapat menjadikan harga produk terjangkau dan juga produsen mencapai efisiensi dan efektifitas dalam proses produksi.

DUKUNGAN PENUH PEMERINTAH KEPADA UMKM HALAL WUJUDKAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB 61% atau senilai Rp8.573 triliun. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar yaitu 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. UMKM masih memiliki kesempatan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi lebih besar. Dari sisi

investasi, UMKM baru memiliki kontribusi sebesar 58,1%. Selain itu, baru 1% UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37%, serta baru ada 6,3% UMKM yang terlibat aktif dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara. (Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI)



Syarat Sertifikasi Halal Gratis

Syarat umum yang diperlukan untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis bagi para pelaku UMKM tersebut yakni sebagai berikut

Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun

Belum pernah mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain

Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB)

Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp 2.000.000.000 yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB

Pelaku UMKM juga wajib memenuhi sejumlah syarat khusus untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis sebagai berikut:

01

Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait

02

Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu)

03

Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi

04

Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku UMKM untuk naik kelas serta mendapatkan citra halal dari masyarakat dan untuk dapat meluaskan pasar serta akses global. Namun, selama ini banyak terkendala dalam proses pengurusan maupun biaya untuk

mendapatkan sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas bagi produk-produk UMKM untuk dapat tumbuh dan bersaing di kancah global.

Peran Perbankan Syariah dalam perkembangan UMKM Halal



Mohammad Isnaeni

Kadiv Mikro BSI

1. Pertumbuhan Bank Syariah sudah semakin baik, dengan margernya 3 Bank Syariah tentu menjadikan kesempatan serta peluang pengembangan pasar syariah semakin pesat dan besar. Salah satu sektor yang tentunya menjadi perhatian bagi Perbankan Syariah adalah UMKM halal yang terus juga berkembang dan tumbuh, menurut bapak apa saja peran Perbankan Syariah dalam perkembangan UMKM Halal?

Tentu Perbankan syariah akan terus memberikan dukungan bagi perkembangan UMKM halal di Tanah Air. Konsen kita juga ambil bagian pada pengembangan ekosistem halal di Indonesia, salah satunya pada sektor UMKM halal. Banyak program yang kami jalankan yang mendukung sektor ini,

diataranya pendampingan usaha, pelatihan dan pembinaan serta permodalan syariah.

Keberpihakan Bank Syariah pada sektor UMKM sudah lama terbangun dan berlangsung dengan sangat baik. Semoga kolaborasi antar pihak dalam mengedepankan unsur syariah dan halal dalam berbisnis dapat terus terjaga, tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Kolaborasi bisnis antara Perbankan Syariah dan UMKM tentu sangat diperlukan, menurut bapak apa strategi Perbankan Syariah dalam mendorong perkembangan UMKM Halal?

Salah satu strategi yang perlu untuk dilakukan dalam mendorong perkembangan UMKM halal yakni dengan cara membuat bangunan ekosistem halal yang harus dilakukan

Perbankan Syariah perlu untuk menghadirkan inovasi produk dan layanan bagi sektor-sektor UMKM halal. Dengan adanya inovasi produk dan layanan yang diberikan kepada UMKM Halal



dari hulu hingga ke hilirnya, ekosistem ini akan menghasilkan sinergi antar pihak. Tidak hanya itu, strategi lainnya dengan menyalurkan pembiayaan secara digital i-Kurma melalui ekosistem halal seperti pesantren, masjid, dan industri industri halal juga terus kita lakukan.

Adapun secara umum, Perbankan Syariah perlu untuk menghadirkan inovasi produk dan layanan bagi sektor-sektor UMKM halal. Dengan adanya inovasi produk dan layanan yang diberikan kepada UMKM Halal, tentu sangat membantu dan memotivasi pertumbuhan usaha yang signifikan. Tidak hanya dalam bentuk permodalan, dapat juga dilakukan dalam bentuk lain seperti pembinaan & pelatihan, pendampingan usaha, pendampingan pemasaran dengan menggunakan teknologi dan lain-lain.

Adanya peran semua pihak dalam ekosistem syariah dan ekosistem halal akan mampu mendorong pertumbuhan segala lini sektor syariah, termasuk UMKM halal dan ini juga menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh produktifitas UMKM.

3. Menurut Anda, bagaimana perbankan Syariah melalui UMKM halal dapat mendorong kebangkitan ekonomi nasional?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbankan syariah dapat memberikan modal kerja usaha dalam bentuk pembiayaan dengan margin yang rendah seperti BSI KUR dan memberikan pelatihan kepada UMKM halal terkait UMKM *go digital* dengan nenggandeng *e-commerce*.

Bank Syariah Indonesia telah melatih 653

UMKM dari target 1000 UMKM ditahun 2021 untuk mendukung keberlangsungan usaha di tengah pandemi. Komitmen Bank Syariah Indonesia untuk terus menghadirkan produk layanan yang sesuai syariah tentu perlu mendapatkan dukungan dari segala lini usaha dan bisnis, tak terkecuali sektor UMKM.

4. Sebagai salah pelaku dan pegiat dalam Perbankan Syariah, apa harapan Anda untuk pengembangan UMKM halal di Indonesia?

Harapan yang paling utama tentunya semoga UMKM halal dapat lebih berkontribusi dalam menumbuhkan perekonomian nasional. UMKM halal dapat menjadi rujukan bagi para pelaku sektor usaha UMKM pada umumnya untuk dapat mengambil pelajaran dalam proses pengembangan usaha syariah sektor mikro.

Kedepan, semoga ekosistem halal yang terbentuk dapat mengakodir sinergi antar pihak dalam mendukung pertumbuhan industri syariah dan halal serta dapat berkontribusi bagi pengembangan UMKM halal di Indonesia dan menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Apa saja hikmah dan hal-hal positif yang dapat diambil dalam kondisi sekarang ini?

Setiap kondisi pasti ada hikmah dibalikinya begitu juga kondisi sekarang ini. Khusus untuk UMKM, hikmahnya UMKM termotivasi untuk mengembangkan usahanya secara digital. Hal tersebut turut membantu produk-produk UMKM untuk dapat dikenal dan bersaing tidak hanya lokal, tapi nasional maupun internasional.

Riset dan kajian mengenai UMKM Halal/ Ketahanan ekonomi UMKM di tengah pandemi



Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

Dosen Fakultas Farmasi UNAIR

1. UMKM berperan penting dalam mendukung stabilisasi ekonomi Indonesia. Sektor ini juga tumbuh dan berkembang sangat produktif, diantara UMKM yang produktif adalah yang fokus dalam pengadaan makanan dan minuman. Terkait hal ini, apakah menjadi urgensi agar UMKM menerapkan sistem dan sertifikasi halal?

Mayoritas perekonomian di Indonesia itu masyarakatnya berjalan dengan UMKM. Jadi itu jumlahnya sangat besar. Hal ini sangatlah penting. Maka dari itu, Produk UMKM banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Ini perlu diperhatikan

Banyak pertanyaan muncul selama saya bekerja di auditor halal “Produk UMKM kan begitu-begitu saja kenapa harus di sertifikasi halal? Produk garam, minyak, itu kan sehari-hari apa betul ada tidak halal?”. Pro-kontra seperti itu ada. Padahal sebenarnya jika

mereka memahami ada potensi ketidakhalalan.

Dari hulu hingga hilirnya harus diperhatikan. Ada makanan yang memang halal tapi prosesnya tidak diperhatikan. Menggunakan bahan gelatin, tapi yang terbuat dari tulang babi. Hal seperti ini penting sekali di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim. Kita harus mendorong UMKM berkembang dengan sertifikasi halal.

2. UMKM tentu memiliki potensi dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional, dengan mayoritas masyarakat muslim dan juga jumlah serta tingkat pertumbuhan UMKM yang semakin pesat akhir-akhir ini. Menurut bapak apa saja potensi, kontribusi dan peran UMKM halal khususnya dalam mendorong kebangkitan perekonomian nasional?

Dikatakan perekonomian suatu bangsa itu baik ketika mayoritas masyarakatnya mempunyai penghasilan yang cukup. Tetapi di Indonesia kenyataannya belum bisa dikatakan seperti itu dan sebagian besar perekonomian terbesar ditopang oleh UMKM. Jadi kalau UMKM-nya jalan maka perekonomian masyarakat akan terangkat.

Dengan dominasi masyarakat muslim, UMKM tentu menjadi salah satu sektor yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah, khususnya UMKM halal. Tidak hanya pada lini

makanan dan minuman saja, banyak sektor seperti industri rumahan, produk-produk kearifan lokal dan budaya serta juga produk yang dihasilkan dari kreatifitas masyarakat.

Dalam bentuk kontribusi dan peran, UMKM halal dapat menjadi contoh yang baik bagi keberlangsungan produk-produk makanan sektor mikro untuk dapat lebih mengedepankan sumber bahan pokok yang halal dan baik. Serta kebersihan dan higienitas juga sangat perlu menjadi perhatian khusus bagi pelaku usaha UMKM, sehingga ini akan memberikan efek produktifitas dan memberikan citra baik bagi pertumbuhan UMKM halal khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya.

3. Dengan pertumbuhan yang signifikan dan target percepatan bisnis yang tinggi tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan UMKM halal di Indonesia, menurut bapak Apa saja tantangan terbesar dari pengembangan UMKM halal dan bagaimana cara mengembangkannya?

Pada saat saya melakukan audit, tantangan terbesarnya adalah dalam bidang pemasaran, disamping produk, oleh karena itu, peran pemerintah dan industri untuk memasarkan produk-produk UMKM halal itu sangat dibutuhkan. Bagaimana tidak hanya menarik peminat dari warga lokal tapi juga wisatawan yang datang. Maka dari itu perlu pemasaran yang baik untuk pengembangannya.

Kedua, menjaga kualitas. Karena mereka belajar seadanya atau turun temurun dari keluarga. Sentuhan strategi pemasaran yang efektif, kreatifitas dan teknologi juga sangat perlu diperhatikan. Mengingat cara pemasaran saat ini yang sangat kompleks dan dinamis,

maka kualitas produk apabila di dukung oleh strategi pemasaran yang baik serta efektif akan sangat berpengaruh pada produktifitas sebuah UMKM. Diharapkan pemerintah atau LSM juga bisa mendukung para pelaku UMKM dan melakukan pembinaan yang tentunya sangat bermanfaat bagi mereka.

4. Masih dalam kondisi COVID-19, yang kita ketahui sangat berpengaruh bagi keberlangsungan sektor usaha UMKM, banyak dari pelaku usaha melakukan



perubahan strategi usaha mereka, melakukan efisiensi hingga sampai ada yang menutup usahanya. Menurut bapak apa saja pengaruh COVID-19 terhadap pengembangan UMKM halal di Indonesia?

Dengan adanya COVID-19 ini, tentu memberikan pengaruh pada semua sektor usaha tak terkecuali UMKM Halal, namun dalam hal UMKM ini saya melihat pengaruhnya bukan terhadap proses mendapatkan status halalnya, tapi lebih kepada lini bisnisnya. Saat COVID-19 semua usaha dalam kelas ekonomi manapun terdampak. Tidak sedikit UMKM yang usahanya sebelum COVID-19 lancar penjualannya, tapi setelah Covid-19 menurun. Hal ini tidak dapat kita prediksi secara detail dan pasti, karena pandemi ini mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, hanya saja bagi pelaku UMKM Halal perlu adaptasi dan strategi khusus dalam menghadapi tantangan usaha kedepan yang tentunya akan sangat kompleks dan memberikan dampak bagi usaha meraka masing-masing.

5. Bagaimana Lembaga riset dan kajian halal di Indonesia berperan penting bagi pengembangan UMKM halal, baik pada saat dan paska pandemi?

Saya kira lembaga riset sangat berperan penting. Suatu produk usaha dikatakan halal atau haram didasarkan pada hasil riset yang dilakukan lembaga riset tersebut yang nantinya hasil itu turut mempengaruhi laju dari pengembangan UMKM halal. Jadi kita sangat

butuh lembaga riset.

Salah satu fungsi dan peran yang Lembaga riset adalah menjaga standarisasi halal yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga memberikan update dalam riset-riset strategis yang terbaru. Hal ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah khususnya dan para pelaku UMKM halal pada umumnya untuk dapat menjaga kualitas produk yang sesuai dan terbaik bagi pengembangan usaha.

6. Apa saja hikmah dan hal-hal positif yang dapat diambil dalam kondisi sekarang ini?

Tidak ada yang tidak ada hikmahnya, termasuk kejadian pandemi COVID-19. Pelaku UMKM bisa introspeksi produk yang dijualnya saat pandemi.

Contohnya, ada penjual kerupuk yang selama ini laris sekali menjual udang. Pandemi sempat membuat si penjual tidak bisa berjualan, dipaksa istirahat.

Selama waktu senggang itu, si penjual memperbaiki produknya. Akhirnya ia menciptakan produk kerupuk yang rasanya lebih enak dan teksturnya lebih bagus. Hal itu berdampak terhadap minat konsumen ketika ia bisa berjualan kembali.

Selain itu, adanya pandemi membuat masyarakat bisa banyak mengikuti pelatihan. Jika sebelumnya, masyarakat harus datang ke tempat pelatihan, harus meninggalkan pekerjaannya juga, tapi kali ini tanpa harus meninggalkan pekerjaan, dan tanpa perlu datang bisa mengikuti pelatihan lewat Zoom.

INTEGRASI FILANTROPI ISLAM DAN INDUSTRI HALAL



Ana Toni Roby Candra Yudha

Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI) Jawa Timur
Dosen FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

Masa pandemi covid 19 belum juga sepenuhnya selesai, namun sudah saatnya semua beralih dalam kebiasaan dan pola hidup yang baru. Kebiasaan yang mengajak segenap pihak untuk menyadari akan pentingnya empati dan saling membantu, serta melakukan kebiasaan hidup sehat di berbagai kegiatan, waktu, tempat, dan kesempatan. Karena diharapkan semua orang merasa seperti satu tubuh, bila satu bagian tubuh merasakan sakit, maka bagian lainnya juga akan merasakan sakit. Bukan justru sebaliknya, jika satu bagian tubuh sakit dan diberi antibiotik, bagian tubuh lainnya hanya 'ditiup' atau bahkan dibiarkan.

Berdasar data yang dilansir oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) per-tanggal ditulisnya

artikel ini ada sebanyak 6 jutaan kasus positif covid 19, dengan 370 ribuan jiwa meninggal, dimana data *fatality risk* di benua Amerika dan Eropa menunjukkan bahwa mereka menjadi episentrum yang masing-masing memiliki kasus positif covid 19 lebih dari 2 juta jiwa. Sedangkan untuk perkembangan covid 19 di Indonesia sendiri, pasien yang terkonfirmasi positif telah menembus angka 230 ribuan sedangkan bagi yang sembuh telah mencapai 166.686 jiwa sejak adanya pengumuman pasien terinfeksi pada 2 Maret 2020. Selain patut berduka atas bertambahnya jumlah pasien meninggal, namun di lain sisi juga perlu diberikan apresiasi untuk kinerja pemerintah dengan berbagai unsur di dalamnya dalam bentuk kita sebagai masyarakat mematuhi protokol dan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Juga tak dipungkiri bahwa, kondisi inilah yang melatarbelakangi adanya krisis yang menyerang segala aspek mulai dari kesehatan, ekonomi, perbankan, pendidikan, sosial, hingga sektor riil, seperti koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

Mengenai dunia perbankan, tidak hanya pada era *corona virus disease* (covid 19) saja mengalami sejumlah efisiensi. Pada awal mula era revolusi industri 4.0 pun, dunia perbankan di Indonesia mengalami pergeseran tata kelola dan kuantitas sumber daya manusia. Pada saat revolusi industri 4.0 hadir, semua pihak sadar dan paham bahwa ini adalah sebuah keniscayaan bukan pilihan. Sehingga



UMKM adalah sektor bisnis riil yang fundamental. Sektor ini sangat strategis dalam menopang perekonomian, yang faktanya telah menyumbang pendapatan nasional (PDB) Indonesia mencapai 98 persen, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 96%.

seluruh level pekerjaan teknis perbankan akan berkurang mencapai 50 %, yang mana teknis pekerjaan tersebut akan dikerjakan secara sistematis dan terkomputerisasi. Hal ini jelas menjadi ujian besar dan tantangan tidak mudah bagi mereka yang tidak mampu menerima, dan akhirnya menemui kesulitan untuk beradaptasi. Bahkan selanjutnya, untuk melakukan sejumlah efisiensi dunia perbankan akan mengandalkan tenaga *outsourcing* untuk mendukung dan mengurangi beban kerjanya. Oleh karena itu, adanya wabah covid 19 yang muncul beriringan dengan revolusi industri, mau atau tidak mau harus disikapi dengan memunculkan kreatifitas baru.

Adapun selain dunia perbankan, terdapat UMKM dan industri halal yang terdampak pandemi covid 19. Khususnya industri halal

yang terdiri atas beberapa jenis bidang bisnis seperti makanan dan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik dan pariwisata halal. Itu sebagian besar terus melakukan sejumlah strategi baru, strategi yang mengandalkan pola distribusi hingga penjualan yang menggunakan medial online (*go virtual*). UMKM adalah sektor bisnis riil yang fundamental. Sektor ini sangat

strategis dalam menopang perekonomian, yang faktanya telah menyumbang pendapatan nasional (PDB) Indonesia mencapai 98 persen, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 96%. Ini merupakan parameter signifikan yang perlu mendapat perhatian penuh dari *stakeholder* unsur apapun dan dimanapun. Tak lupa pula bahwa industri halal, saat masuk dalam era revolusi industri 4.0, telah menjadi bisnis yang dikategorikan primadona baru di dunia dan di Indonesia khususnya.

Kita tetap bersyukur dan terus produktif

Sebagian besar bisnis di dunia jelas terdampak, sebagian besar negara pun secara demografi penduduknya juga terjangkit covid 19. Indonesia, sebagai negara yang memiliki kemajemukan karakter dan sumber daya, seharusnya mampu mengambil kondisi ini menjadi hikmah dan peluang. Memang covid 19 berpengaruh pada fisik dan psikologis manusia, itu sementara dan memang wajar, namun seharusnya tidak perlu pula khawatir yang berlebihan akan adanya pandemik. Karena pada gilirannya Indonesia wajib bersikap dan memiliki perasaan optimis di tengah kondisi ini. Singapura, sebagai salah satu negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, bahkan unsur pendukung kehidupannya seperti air bersih dan listrik-pun sangat bergantung dari negara-negara tetangganya. Mereka pada Januari 2020 saat awal era covid 19, pertumbuhan ekonominya berkisar angka 0,5 persen dan dewasa ini mereka mengumumkan pertumbuhan ekonominya adalah *minus* 40an persen. Malaysia, sebagai salah satu negara yang fundamental ekonominya bergantung pada minyak bumi dan *crued palm oil* (CPO) atau minyak sawit, juga menghadapi masalah

yang sama yaitu memiliki ketergantungan dari negara lain, dan mengalami pertumbuhan ekonomi *minus* 17 persen.

Maka dari itu, masyarakat hendaknya tetap optimis dan produktif dengan memproduksi dengan menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri dan menjualnya pada konsumen dalam negeri pula. Nampaknya hal ini sangat perlu dilakukan guna memastikan perputaran rantai persediaan produk dari produsen hingga ke konsumen, dengan begitu harapannya ekonomi masyarakat tetap berputar dan distribusi kesejahteraan juga berjalan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap memiliki keperluan dan menjaga hubungan bisnis dengan pihak luar negeri, yang juga terus mendukung penuh industri kecil dan industri halal. Suntikan modal tunai dari pemerintah kepada para pelaku usaha khususnya usaha mikro, diharapkan dapat menjaga kestabilan



masyarakat hendaknya tetap optimis dan produktif dengan memproduksi dengan menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri dan menjualnya pada konsumen dalam negeri pula.

produksi, yang kemudian didistribusikan kepada pasar dan konsumen. Seperti halnya teori yang pernah disampaikan oleh David Ricardo bahwa *'supply creates its own demand'*, yang bermakna setiap produk yang ditawarkan atau dijual akan memunculkan permintaan atau akan dibeli oleh konsumen. Tentunya pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan barang dan *volume* konsumsi konsumen akan barang itu sendiri.

Saat UMKM dan industri halal secara umum menurun kinerjanya, masih juga terdapat lebih kurang 25-30 persen UMKM yang bertahan bahkan meningkat *volume* penjualannya. Mereka bertahan karena mulai dari sistem penjualan, distribusi, agen, hingga sistem pembayaran, semua terintegrasi secara *online*. Adanya pembatasan sosial

telah mengubah sistem perputaran bisnis, dan sudah sewajarnya seorang pelaku UKM dan industri halal melihat ini sebagai peluang dalam memanfaatkan teknologi digital, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis, memperluas jaringan, dan tentunya meningkatkan penjualan.

Era normal baru telah dimulai karena masa pembatasan tidak mungkin diberlakukan selamanya. Sikap semangat, tidak mementingkan diri sendiri, menjaga produktifitas serta sinergi semua pihak dapat menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, tidak hanya kala pandemi covid 19, tapi juga seterusnya. Sebagaimana industri lain, UMKM dan industri halal harus mengambil peluang dan adaptif agar mampu pulih dan kuat kembali. *In Syaa Allah...*



Yuk! Cek Kehalalan Produk Kamu!



Setelah Punya Sertifikasi Halal, Trus Ngapain??



Menyatukan Langkah, Memajukan Negeri

 @kneks.id  @kneks_id  @kneks.id  www.kneks.go.id



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PENGANGKUTAN, MAMPU DAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KOMERSI DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPH
Dapenas



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian Perindustri
dan Kawasan Industri
Kemendikbud



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



Otoritas
Jasa
Keuangan



KADIN INDONESIA



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Diterbitkan oleh:

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Kantor KNEKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C